


# **LAPORAN**

The background features a large, semi-transparent watermark of the official seal of the Pengadilan Negeri Tanah Grogot. The seal is circular and contains a central emblem with a shield and a banner. The banner at the bottom of the emblem reads "DHARMMAYUKTI". The text "PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT" is written around the perimeter of the seal.

**HASIL PELAKSANAAN  
SURVEI PERSEPSI KORUPSI  
PADA  
PENGADILAN NEGERI  
TANAH GROGOT KELAS II**

**TRIWULAN IV**

**TAHUN 2022**

# KATA PENGANTAR

Sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi Presiden Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang stranas PPK jangka panjang 2012- 2025 dan Stranas PPK jangka Menengah tahun 2012-2019.

Sebagai tindak lanjut atas rumusan strategi tersebut Pemerintah menyusun Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang diimplementasikan dan dievaluasi setiap tahun. Presiden secara tegas mengintruksikan kepada semua jajaran pemerintah baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota) untuk mengimplementasikan stranas PPK (Transparency International. tahun 2016).

Mahkamah Agung RI sebagai salah satu lembaga negara dalam bidang penegakan hukum turut mendukung program pemerintah tersebut dan berupaya terus mencegah terjadinya korupsi dalam penyelenggaraan kegiatan khususnya kegiatan layanan kepada masyarakat pengguna layanan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II sebagai salah satu satker di daerah yang mempunyai fungsi layanan kepada masyarakat telah berupaya melakukan pencegahan korupsi dengan menciptakan layanan yang bersih, transparan dan akuntabel. Dan pada tahun 2022 ini Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II melakukan survey untuk mengukur indeks persepsi korupsi dari responden yang mendapatkan layanan. Penilaian indeks persepsi korupsi di Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II diharapkan semakin meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat

Laporan ini menyajikan sejauh mana fungsi layanan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II yang akuntabel dan transparan di mata masyarakat Terimakasih atas dukungan semua pihak, Semoga laporan Indeks Persepsi Korupsi ini berguna untuk kita semua.

Tanah Grogot, 31 Desember 2022  
Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II

**Ketua**



**MADE ADICANDRA PURNAWAN, SH.**  
**NIP. 19780831 200212 1 003**

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud Dan Tujuan .....	2
1.3. Landasan Hukum .....	2
1.4. Rencana Kerja.....	2
<b>BAB II METODOLOGI</b> .....	4
2.1. Metode Penelitian.....	4
2.2. Populasi Dan Sampel .....	4
2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis.....	4
2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control.....	4
2.5. Teknik Analisis Data .....	5
2.6. Tahapan pelaksanaan .....	6
<b>BAB III INDEKS PERSEPSI KORUPSI</b> .....	8
3.1. Profil responden .....	8
3.2. Indeks persepsi korupsi per indicator.....	10
3.3. Indeks persepsi korupsi satuan kerja pada pengadilan.....	18
3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan satuan kerja pada pengadilan .....	19
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	20
4.1. Kesimpulan.....	20
4.2. Rekomendasi .....	20
<b>PENGELOLAAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI</b> .....	21

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2019 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

## **1.2. Maksud Dan Tujuan**

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

## **1.3. Landasan Hukum**

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

## **1.4. Rencana Kerja**

### **1.4.1. Persiapan**

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi

beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana  
Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya;
- Penyiapan Bahan
  - a. Kuesioner.
  - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
  - c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
  - a. Jumlah Responden.
  - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal  
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

#### **1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data**

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

#### **1.4.3. Metode Survei**

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 bulan (empat kali dalam satu tahun).

## **BAB II**

### **METODOLOGI**

#### **2.1. Metode Penelitian**

Penelitian Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

#### **2.2. Populasi Dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

#### **2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

#### **2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control**

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa

wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu tiga bulan atau data minimal 30 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan). Wakil Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPAK.

## 2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut:

**Pertama**, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

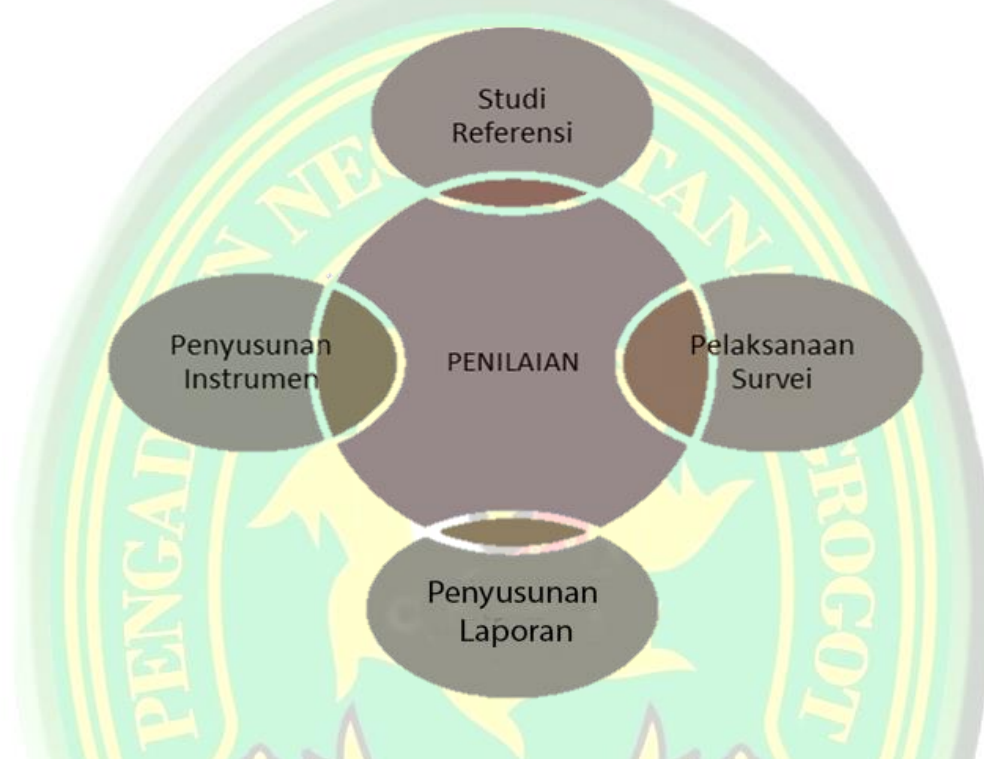
Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

## 2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

**Tabel 1**

**Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas**



**Tabel 2**

**Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Korupsi**

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Transaksi Rahasia
6	Biaya Tambahan
7	Hadiah
8	Transparansi Pembayaran
9	Percaloan
10	Perbuatan Curang

**Tabel 3**  
**Nilai Persepsi**

<b>Nilai Persepsi</b>	<b>Nilai Interval</b>	<b>Nilai Interval Konversi IPK</b>	<b>Mutu</b>	<b>Kinerja</b>
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi



### BAB III INDEKS PERSEPSI KORUPSI

#### 3.1. Profil responden

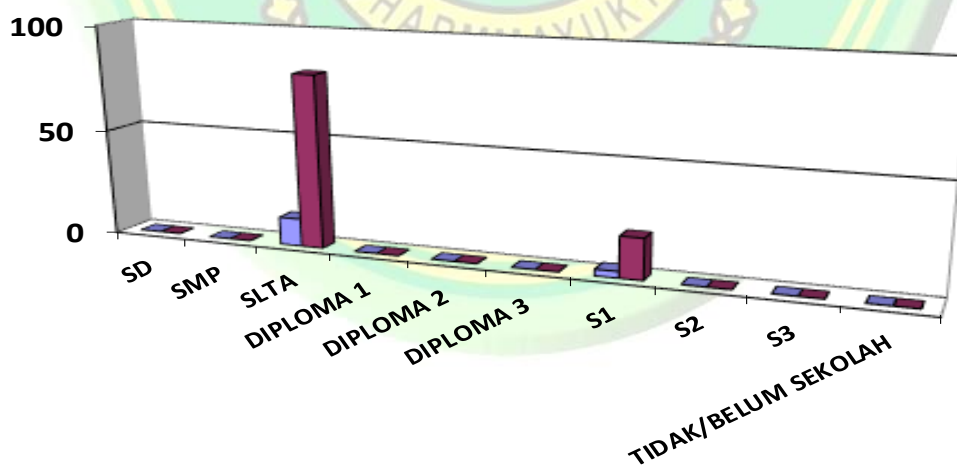
##### 3.1.1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada pengadilan mayoritas memiliki latar Pendidikan SMA.

**Tabel 4.**  
**Tingkat Pendidikan Responden**

NO	PENDIDIKAN TERAKHIR	FREKUENSI	(%)
1	SD	0	0%
2	SMP/SLTP	0	0%
3	SMA/SLTA	13	81%
4	DIPLOMA 1	0	0%
5	DIPKOMA 2	0	0%
6	DIPLOMA 3	0	0%
7	S1	3	19%
8	S2	0	0%
9	S3	0	0%
10	TIDAK / BELUM SEKOLAH	0	0%
<b>JUMLAH</b>		<b>16</b>	<b>100%</b>

*grafik statistik*



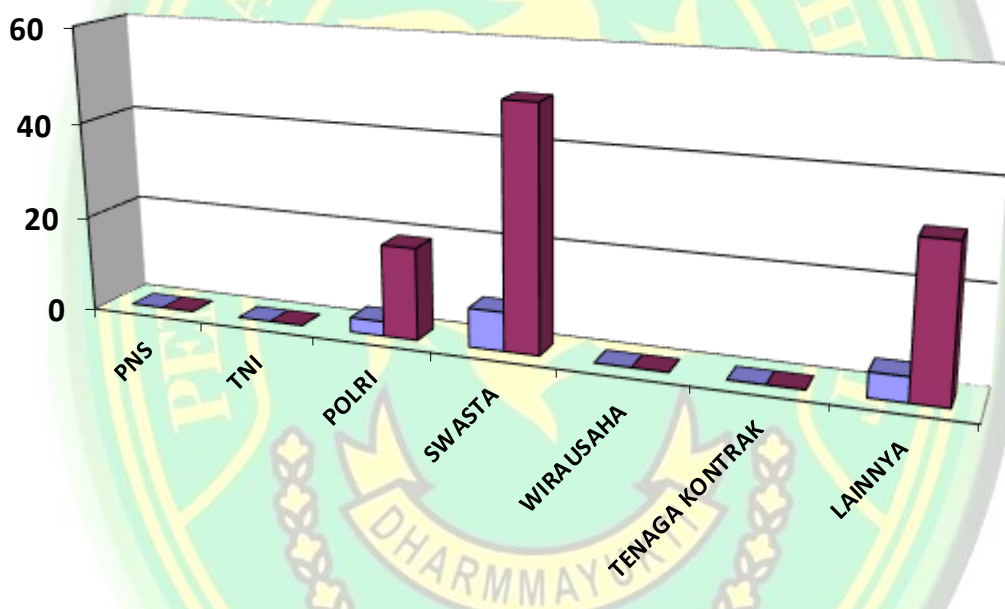
##### 3.1.2. Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa mayoritas pekerjaan pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot adalah Swasta.

**Tabel 5.**  
**Jenis pekerjaan responden**

NO	PEKERJAAN UTAMA	FREKUENSI	(%)
1	PNS	0	0%
2	TNI	0	0%
3	POLRI	3	19%
4	SWASTA	8	50%
5	WIRUSAHA	0	0%
6	TENAGA KONTRAK	0	0%
7	LAINNYA	5	31%
	<b>JUMLAH</b>	<b>16</b>	<b>100%</b>

*grafik statistik*



### 3.1.3. Kelompok usia responden

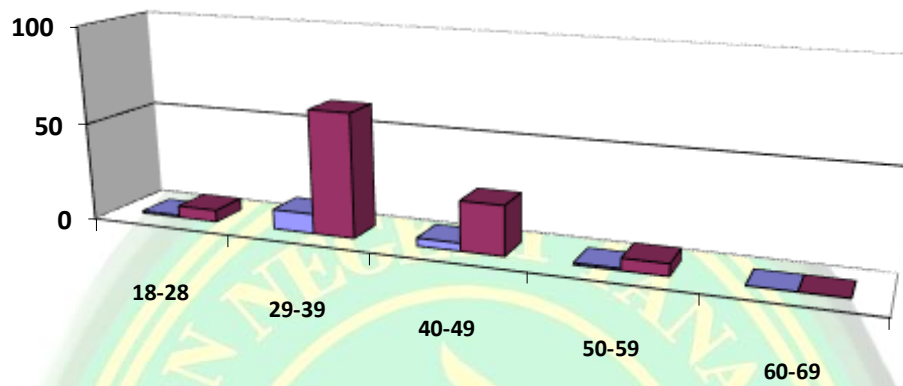
Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 29 tahun s/d 39 tahun.

**Tabel 6.**  
**Usia responden**

NO	UMUR	FREKUENSI	(%)
1	18-28	1	6%

<b>2</b>	<b>29-39</b>	<b>10</b>	<b>63%</b>
<b>3</b>	<b>40-49</b>	<b>4</b>	<b>25%</b>
<b>4</b>	<b>50-59</b>	<b>1</b>	<b>6%</b>
<b>5</b>	<b>60-69</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>JUMLAH</b>		<b>16</b>	<b>100%</b>

*grafik statistic*



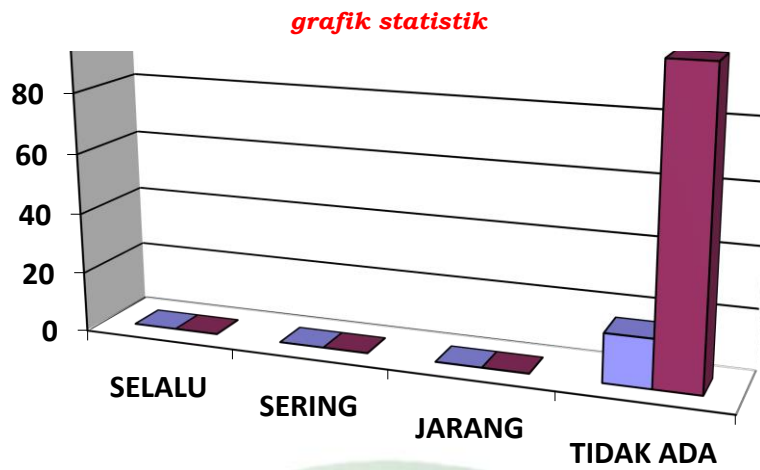
### 3.2. Indeks persepsi korupsi per indicator

#### 3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index 100%. Indeks 100% dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Tanah Grogot bersih dari korupsi.

**Tabel 7.**  
**Indeks pada indikator manipulasi peraturan**

<b>NO</b>	<b>JAWABAN</b>	<b>SKOR</b>	<b>FREKUENSI</b>	<b>(%)</b>
<b>1</b>	<b>Selalu</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>2</b>	<b>Sering</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>3</b>	<b>Jarang</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>4</b>	<b>Tidak Ada</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>100%</b>
<b>JUMLAH</b>			<b>16</b>	<b>100%</b>



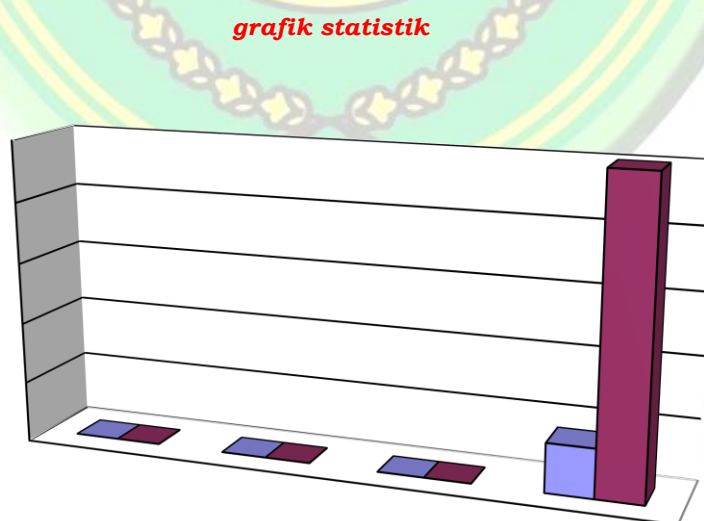
### 3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada indeks 100%. Indeks 100% dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot bersih dari korupsi.

**Tabel 8.**

**Indeks pada indikator penyalahgunaan jabatan**

NO	JAWABAN	SKOR	FREKUENSI	(%)
1	Selalu	1	-	0%
2	Sering	2	-	0%
3	Jarang	3	-	0%
4	Tidak Ada	4	16	100%
<b>JUMLAH</b>			<b>16</b>	<b>100%</b>



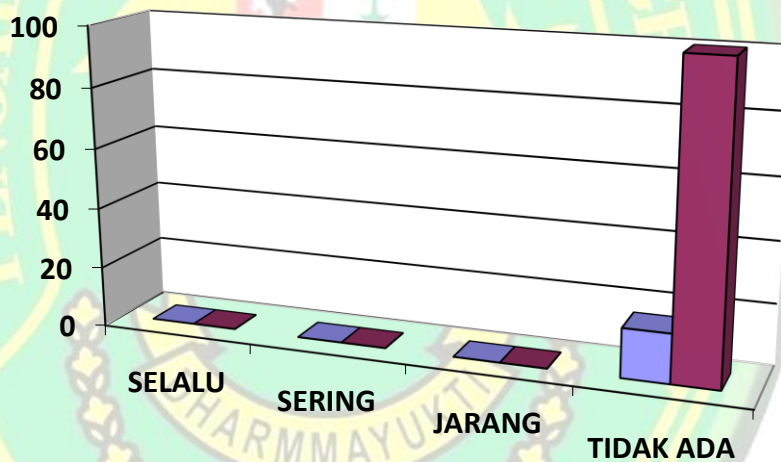
### 3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada indeks 100%. Indeks 100% dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot cukup bersih dari korupsi.

**Tabel 9.**  
**Indeks pada indikator menjual pengaruh**

NO	JAWABAN	SKOR	FREKUENSI	(%)
1	Selalu	1	-	0%
2	Sering	2	-	0%
3	Jarang	3	-	0%
4	Tidak Ada	4	16	100%
JUMLAH			16	100%

*grafik statistik*



### 3.2.4. Indikator Transaksi Biaya

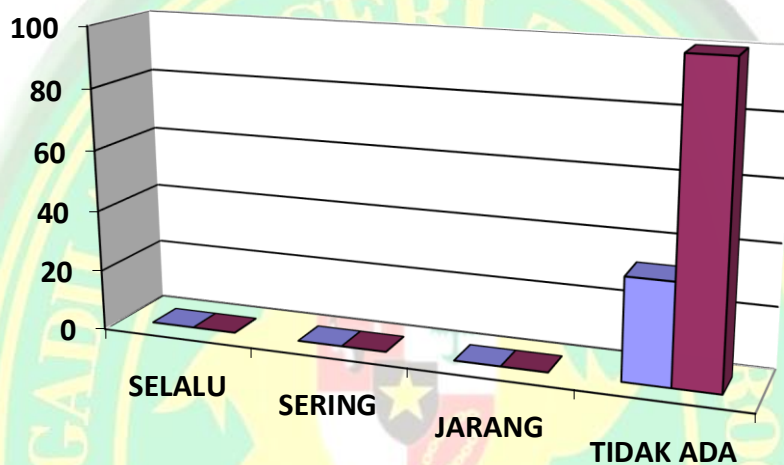
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Biaya ini menunjukkan hasil pada indeks 100%. Indeks 100% dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot bersih dari korupsi.

Tabel 10.

Indeks pada indikator transaksi biaya

NO	JAWABAN	SKOR	FREKUENSI	(%)
1	Selalu	1	-	0%
2	Sering	2	-	0%
3	Jarang	3	-	0%
4	Tidak Ada	4	16	100%
JUMLAH			16	100%

grafik statistik



### 3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

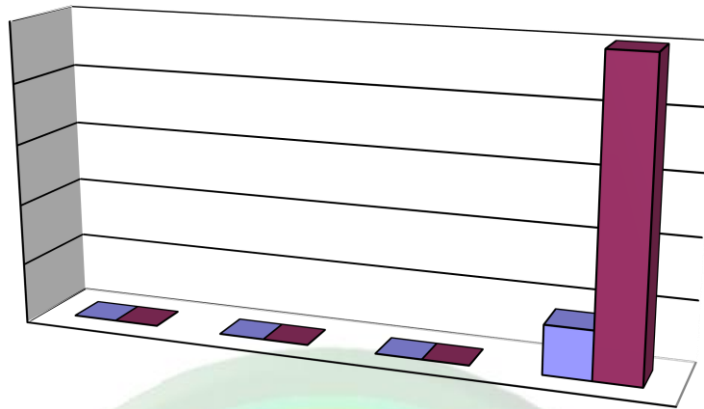
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada indeks 100%. Indeks 100% dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot bersih dari korupsi.

Tabel 11.

Indeks pada indikator biaya tambahan

NO	JAWABAN	SKOR	FREKUENSI	(%)
1	Selalu	1	-	0%
2	Sering	2	-	0%
3	Jarang	3	-	0%
4	Tidak Ada	4	16	100%
JUMLAH			16	100%

*grafik statistik*



3.2.6. Indikator Hadiah

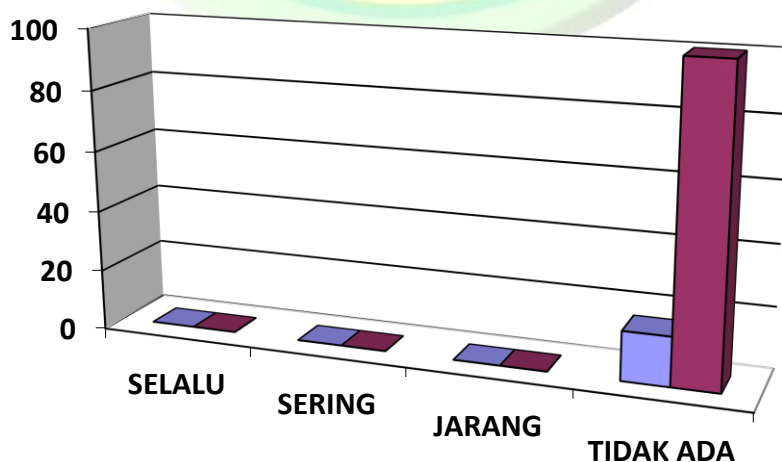
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada indeks 100%. Indeks 100% dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot bersih dari korupsi.

**Tabel 12.**

**Indeks pada indikator manipulasi peraturan**

NO	JAWABAN	SKOR	FREKUENSI	(%)
1	Selalu	1	-	0%
2	Sering	2	-	0%
3	Jarang	3	-	0%
4	Tidak Ada	4	16	100%
JUMLAH			16	100%

*grafik statistik*



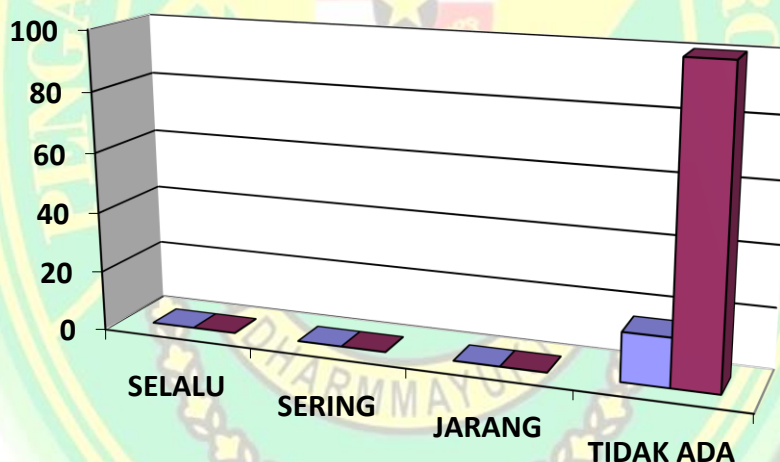
### 3.2.7. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada indeks 100%. Indeks 100% dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot bersih dari korupsi.

**Tabel 13.**  
**Indeks pada indikator transparansi biaya**

NO	JAWABAN	SKOR	FREKUENSI	(%)
1	Selalu	1	-	0%
2	Sering	2	-	0%
3	Jarang	3	-	0%
4	Tidak Ada	4	16	100%
<b>JUMLAH</b>			<b>16</b>	<b>100%</b>

*grafik statistik*



### 3.2.8. Indikator Percaloan

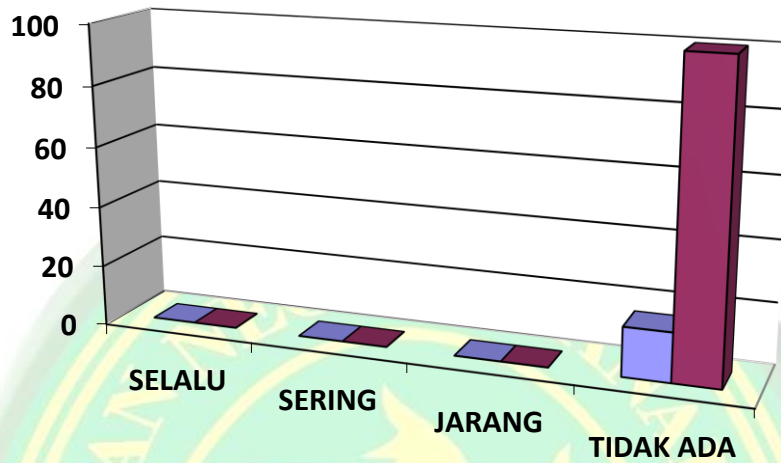
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada indeks 100%. Indeks 100% dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot bersih dari korupsi.

**Tabel 14.**  
**Indeks pada indikator percaloan**

NO	JAWABAN	SKOR	FREKUENSI	(%)
1	Selalu	1	-	0%

2	Sering	2	-	0%
3	Jarang	3	-	0%
4	Tidak Ada	4	16	100%
JUMLAH			16	100%

*grafik statistik*



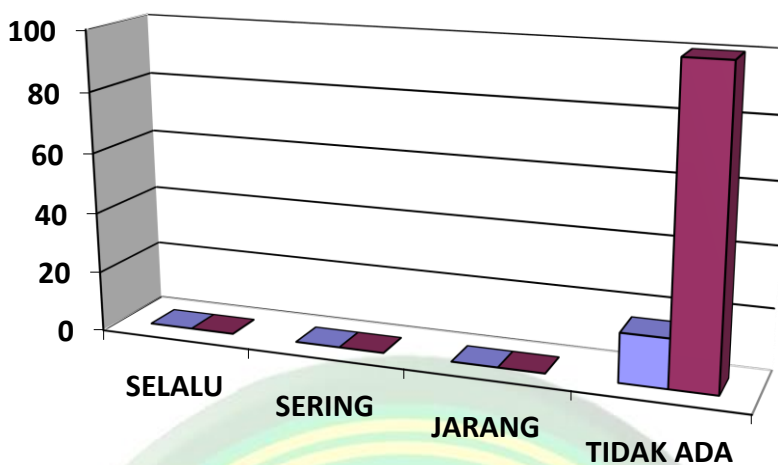
### 3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada indeks 100%. Indeks 100% dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot bersih dari korupsi.

**Tabel 15.**  
**Indeks pada indikator perbuatan curang**

NO	JAWABAN	SKOR	FREKUENSI	(%)
1	Selalu	1	-	0%
2	Sering	2	-	0%
3	Jarang	3	-	0%
4	Tidak Ada	4	16	100%
JUMLAH			16	100%

*grafik statistik*



3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia

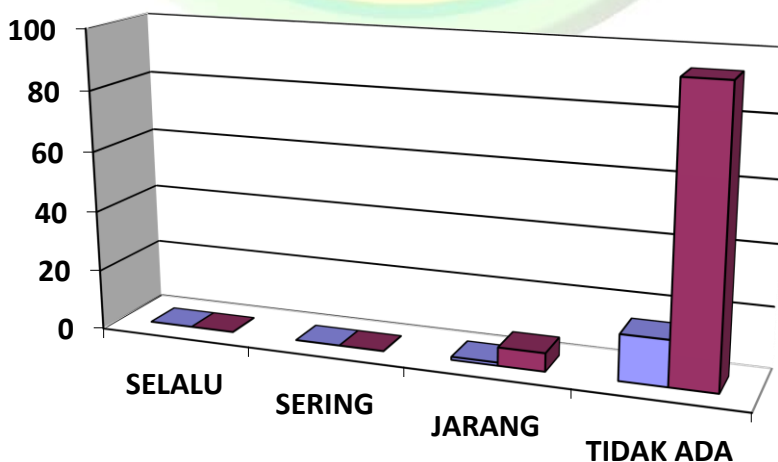
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada indeks 100%. Indeks 100% dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot cukup bersih dari Korupsi.

**Tabel 16.**

**Indeks pada indikator transaksi rahasia**

NO	JAWABAN	SKOR	FREKUENSI	(%)
1	Selalu	1	-	0%
2	Sering	2	-	0%
3	Jarang	3	1	6%
4	Tidak Ada	4	15	94%
<b>JUMLAH</b>			<b>16</b>	<b>100%</b>

*grafik statistik*



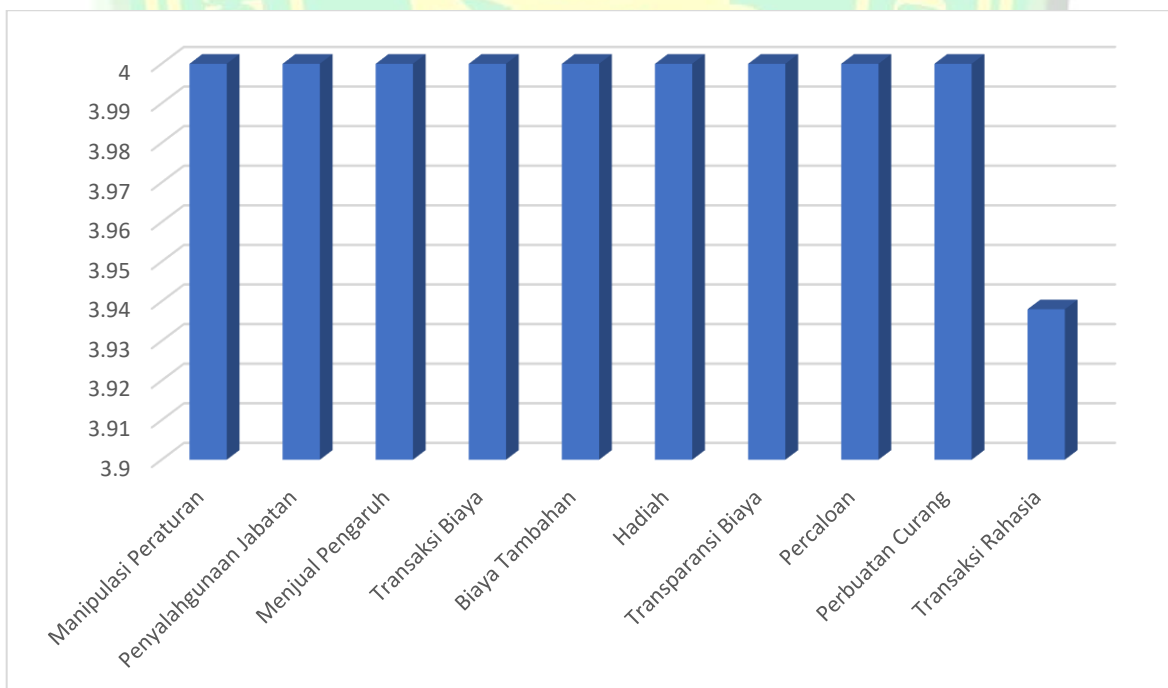
### 3.3. Indeks persepsi korupsi satuan kerja pada pengadilan

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Nilai Interval 3,99 dan Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Tanah Grogot sebesar 99,84%.

**Tabel 17.**  
**Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan**

No	Ruang Lingkup	Rata-Rata Skor	Kategori	Peringkat
1	Manipulasi Peraturan	4,000	Bersih	1
2	Penyalahgunaan Jabatan	4,000	Bersih	2
3	Menjual Pengaruh	4,000	Bersih	3
4	Transaksi Biaya	4,000	Bersih	4
5	Biaya Tambahan	4,000	Bersih	5
6	Hadiah	4,000	Bersih	6
7	Transparansi Biaya	4,000	Bersih	7
8	Percaloan	4,000	Bersih	8
9	Perbuatan Curang	4,000	Bersih	9
10	Transaksi Rahasia	3,938	Bersih	10

*grafik statistik*



### 3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan satuan kerja pada pengadilan

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangkau masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II.

Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

**Tabel 18.**

**Isian masukan dan pandangan pengguna Layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II**

<b>No</b>	<b>Masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan</b>
1	Terimakasih atas pelayanannya;
2	Pertahankan dalam pelayanan yang diberikan;
3	Pelayanan yang diberikan sudah cukup dan oke;
4	Tingkatkan lagi pelayanan yang diberikan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II memiliki Indeks Persepsi Korupsi 3,99 atau masuk pada kategori Bersih dari Korupsi.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 4,000
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 4,000
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 4,000
4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks 4,000
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 4,000
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 4,000
7. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 4,000
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 4,000
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 4,000
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 3,938

#### **4.2. Rekomendasi**

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II Tahun 2022 pada Triwulan IV tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks Tertinggi yaitu 4,000 atau masuk pada persepsi Bersih dari Korupsi. Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator Transaksi Rahasia mendapat indeks 3,938 memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya, dan harus menjadi sasaran peradilan untuk ditingkatkan oleh jajaran Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II.

## PENGELOLAAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI

Satuan Kerja : Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman, Tanah Grogot, Kec. Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur 76211

Responden	UNSUR-UNSUR PERTANYAAN										Keterangan	
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	

16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
<b>Jumlah</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>63</b>	
<b>N. Rata-rata</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	<b>3,939</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	<b>3,938</b>	<b>39,938</b>
<b>Bobot NRR Tertimbang</b>	<b>0,400</b>	<b>0,400</b>	<b>0,394</b>	<b>0,400</b>	<b>0,400</b>	<b>0,400</b>	<b>0,400</b>	<b>0,400</b>	<b>0,400</b>	<b>0,400</b>	<b>0,394</b>	<b>3,994</b>
<b>IPAK Unit Pelayanan</b>											<b>3,99</b>	

